

Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan Desa Berbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat

Yoga Andriyan¹, Munzir², Andi Sismar³, Aldila Mawanti Athirah⁴, Rahmat Hidayat⁵, Henraman⁶, Dhimas Ari Bhima Sakti⁷

^{1,7}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³Program Studi Agribisnis, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{4,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

INFO ARTIKEL

Corresponding author email:
yogaandriyanmana@gmail.com

Diterbitkan secara online:
15/11/2024

Keywords:

Implementasi,
E-Government,
Tata Kelola Pemerintah Desa,
Fafanlap,
Raja Ampat

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah E-Government, yang bertujuan untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih jelas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan E-Government sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Desa Fafanlap sering menghadapi masalah dalam mengelola administrasi publik secara efisien dan terbuka, terutama di kepulauan yang terpencil. Melalui metode ini, kami menyarankan penggabungan teknologi informasi untuk mempercepat akses ke layanan publik dan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Metodologi pengabdian sosialisasi ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang e-government dan tata kelola desa yang efektif di Fafanlap, Raja Ampat. Aplikasi E-Government di Fafanlap, Raja Ampat memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Desa dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik, membuat hal-hal lebih transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. E-Government meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan mengurangi birokrasi. Desa mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke layanan publik seperti administrasi kependudukan, perijinan, dan anggaran. Selain itu, E-Government dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa melalui pendampingan dan pelatihan teknologi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan masa kini.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Copyright@ Author (2024).

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa, terus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Pencatatan data elektronik (big data) dan peningkatan konektivitas internet ke perangkat fisik (internet of things) adalah tanda perkembangan Era Society 5.0. Pencatatan buku besar elektronik (block chain) muncul sebagai sistem baru dalam teknologi saat ini [1]. Hal ini juga tidak terlepas pada pengembangan Desa pada aspek tata kelola pemerintahan yang berbasis informasi teknologi.

Konsep tata kelola yang baik mengutamakan transparansi yang dapat ditafsirkan dalam menerapkan tata kelola yang baik [2], [3], [4]. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat [5]. Pemerintahan di tingkat desa bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan publik dan pelayanan masyarakat dengan baik.

Desa mandiri merupakan contoh masyarakat desa yang memiliki keinginan yang kuat untuk maju, menghasilkan produk dengan kekhasan desa atau lokal yang membanggakan desa, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri [6], [7], [8], [9]. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sistem pemerintahan desa dapat membantu pengambilan keputusan, menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan, dan membuat perangkat desa bertanggung jawab atas operasi pemerintahan. Ini akan menghasilkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mandiri, yang akan mengurangi kesenjangan digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat [10].

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan e-Gov, tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mulus di tingkat pemerintah daerah, yang menimbulkan tantangan bagi e-Gov sebagai alat utama pemerintah. Faktor yang menghambat pertumbuhan e-Gov adalah ketakutan terhadap perubahan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, e-Gov Desa dapat membantu pemerintahan desa modernisasi dengan menerapkan Teknologi Informasi [11], [12]. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, e-Government dianggap sebagai alat yang tepat untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah desa secara efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna, transparan, dan berkeadilan [13]. E-government adalah inovasi yang berasal dari proses pemerintahan berbasis elektronik, dan saat ini sangat populer karena kemajuan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab manajemen. Sebuah organisasi berusaha meningkatkan nilai publik untuk mengatasi tantangan di era globalisasi saat ini [14].

E-Government merupakan salah satu pendekatan yang disarankan, yang bertujuan untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih jelas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. E-Government adalah upaya untuk membuat pemerintahan beroperasi secara elektronik [15]. Teknologi memudahkan cara kerja untuk membantu masyarakat [16].

Implementasi E-Government akan membantu pada proses administrasi yang sebelumnya

membutuhkan banyak waktu dan biaya. Sistem elektronik akan membuat data dan informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara online, yang meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor desa. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan informasi yang akurat akan didukung oleh data yang mudah diakses dan terintegrasi. E-government adalah setiap tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah [17]. Dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini, transformasi pemerintahan digital sangat penting. Beberapa alasan penting untuk transformasi ini adalah meningkatkan efisiensi, penghematan biaya, dan peningkatan keterlibatan warga [18].

Desa Fafanlap yang berada di distrik misol Selatan kabupaten Raja Ampat memiliki potensi besar dalam banyak hal, seperti pariwisata, perikanan, dan kelautan. Namun, permasalahan yang terjadi adanya keterbatasan dalam manajemen pemerintahan desa, penggunaan teknologi yang masih minim dan proses administrasi yang konvensional. Banyak pegawai desa tidak familiar dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pelayanan masyarakat [19]. Pemerintah desa, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, harus mempersiapkan kemampuan perangkat desa untuk pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi.

Desa Fafanlap yang berada di distrik misol Selatan kabupaten Raja Ampat, menghadapi berbagai masalah dengan sistem pemerintahan yang efektif. Masyarakat desa menghadapi kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dan kebijakan pemerintah desa yang relevan karena lokasi kepulauan yang terpencil. Informasi yang terbatas ini dapat mencegah masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lokal dan mengurangi transparansi pemerintahan. Desa menghadapi masalah dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan teknologi [20], [21], [22]. Hal ini dapat menghambat adopsi teknologi baru seperti E-Government. Kondisi administratif yang tidak terorganisir dapat menyebabkan kurang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan program pembangunan. Ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Metode administrasi konvensional untuk mengelola data dan layanan publik dapat menghambat pemerintahan desa untuk bekerja lebih efisien dan memenuhi tuntutan masyarakat yang berkembang pesat.

Dalam situasi ini, penerapan E-Government adalah solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, memberikan akses yang cepat dan transparan ke informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Desa-desanya di Selatan Misool dapat memanfaatkan potensi digitalisasi di tengah kemajuan teknologi yang pesat untuk memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan mengatasi tantangan administrasi. Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, relevansi, prinsip, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, penghargaan terhadap lingkungan dan masyarakat, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang mendukung pembangunan berkelanjutan [23], [24], [25].

Dengan menerapkan platform yang memudahkan akses ke informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa,

implementasi E-Government diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah ini. Desa-desanya di Fafanlap dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan paparan Analisa situasi, maka permasalahan dalam kegiatan pengabdian antara lain:

1. Penggunaan IT pada tata kelola pemerintahan belum memadai.
2. Aparat pemerintahan desa belum memahami penggunaan IT dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa.
3. Implementasi IT yang dilakukan belum efektif dan efisien kepada masyarakat.

Adapun tujuan dalam kegiatan pengabdian antara lain sebagai berikut.

1. Memaksimalkan penggunaan IT pada tata kelola pemerintahan baik dalam hal pelayanan publik maupun informasi publik.
2. Meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah desa dalam penggunaan IT dalam tata kelola pemerintahan desa
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa yang berbasis IT.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Pemerintah Desa Fafanlap yang berada di distrik misol Selatan kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Pihak yang terlibat didalam kegiatan diantaranya 10 aparat desa, Masyarakat mitra sebanyak 10 orang dan perwakilan distrik misol selatan 5 orang, Sehingga total peserta berjumlah 25 orang.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan beberapa kegiatan secara terstruktur, antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahapan persiapan berfungsi untuk melakukan komunikasi awal dengan Tim pengabdian dan mitra dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang hasilnya memberikan gambaran awal pada tim mengenai penentuan lokasi dan target serta tujuan kegiatan pengabdian.

2. Wawancara

Tim pengabdian melakukan wawancara kepada mitra dalam hal ini Kepala Kampung Pemerintah Desa Fafanlap. Dalam tahapan ini berfungsi untuk mengumpulkan data permasalahan mendalam, kendala serta tantangan yang akan dihadapi Ketika melaksanakan pengabdian.

3. Sosialisasi

Dalam tahapan ini tim pengabdian memberikan pengenalan terkait peningkatan pengetahuan tentang E-Government untuk Tata Kelola Pemerintah Desa Fafanlap yang berada di distrik misol Selatan kabupaten Raja Ampat. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan Gambaran awal pada mitra mengenai maksud dan tujuan serta materi yang akan didapatkan dalam pengabdian.

4. Workshop atau Pelatihan

Dalam tahapan pelatihan atau workshop, mitra diberikan pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan e-government pada tata kelola pemerintahan desa. Tahapan ini sangat penting diketahui perkembangan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.

5. Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan dengan melihat hasil pelatihan. Peningkatan mitra menjadi tolak ukur yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan seberapa besar capaian hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kampung Fafanlap merupakan kampung yang asri, terletak di pinggir laut dengan luas wilayah sebesar sekitar 1 km². Secara administratif, Kampung Fafanlap adalah bagian dari Distrik Fafanlap. Distrik Fafanlap merupakan hasil pemekaran dari distrik sebelumnya yaitu, distrik Misool Timur Selatan yang dipecah menjadi dua distrik yaitu distrik Misool Timur dan Fafanlap. Ibu kota distrik Fafanlap di Dabatan. Jumlah kampung yang termasuk dalam distrik Fafanlap ada lima kampung, yakni Kampung Fafanlap, Kampung Yellu, Kampung Kayerepop, Kampung Harapan Jaya atau Ya dan Kampung Dabatan. Dari lima kampung di Fafanlap, dua kampung yakni Kampung Yellu dan Kampung Usaha Jaya (Kafopop) di distrik Misool Timur adalah pecahan dari kampung Fafanlap. Selanjutnya, kampung Yellu dimekarkan lagi membentuk kampung Kayerepop dan Dabatan.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kampung Fafanlap adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Temulol (Distrik Misool Timur)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kafopop / Kampung Usaha Jaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Yefpale di Kampung lilinta
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung gamta

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada kampung Fafanlap Distrik Misol Selatan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, antara lain sebagai berikut:

1. Pra Pelaksanaan

Pra Pelaksanaan dilakukan dengan Persiapan dan wawancara bersama mitra. Hal ini berfungsi untuk memberikan Gambaran awal kondisi mitra serta Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengabdian. Adapun tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dalam menggali target dan tujuan serta Lokasi kegiatan pengabdian maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memberikan beberapa pengenalan terkait Implementasi E-Government Untuk Tata Kelola Pemerintah Desa di Fafanlap, Raja Ampat. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan Gambaran awal pada mitra mengenai maksud dan tujuan serta materi yang akan didapatkan dalam pengabdian. Pelatihan atau workshop dilakukan dengan memberikan contoh langsung kepada mitra dalam penggunaan website desa, penggunaan monografi desa berbasis online, pelayanan administrasi dengan menggunakan call center dan informasi terkini melalui media sosial desa.

3. Pasca Pelaksanaan

Dalam evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan pree test dan post-test sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun hasil pree test peserta yang berjumlah 25 orang, sebanyak 5 orang atau sebanyak 20% yang sudah paham dalam penggunaan IT dalam tata kelola pemerintahan desa. Setelah diadakan pengabdian dilakukan post tes, hasilnya mengalami

peningkatan dari jumlah 25 orang peserta, sebanyak 15 orang atau 60% sudah paham penggunaan IT dalam tata kelola pemerintahan desa, baik berupa informasi website, media sosial dan call center yang diterapkan pada pengembangan desa berbasis IT.

Terlihat dari hasil pree test dan post test di atas mengalami peningkatan lebih dari 50%, artinya ada peningkatan signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan pengabdian. Namun, hal ini belum tercapai maksimal dikarenakan aparat desa masih banyak yang tidak bergelar sarjana, belum melek teknologi dan kurangnya minat dalam menambah pengetahuan tentang teknologi serta alata tau akses internet yang juga menjadi kendala dikarenakan kampung fafanlap tergolong kampung yang jauh dari akses kota atau ibu kota kabupaten Raja Ampat.



Gambar 1. Sosialisasi Implementasi E-Government Untuk Tata Kelola Pemerintah Desa di Fafanlap, Raja Ampat



Gambar 3. Sharing **session** bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat

E-Government dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan lokal. Tidak banyak infrastruktur teknologi yang tersedia, akses internet yang tidak merata, dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola teknologi informasi adalah masalah utama dalam menerapkan E-Government di Kampung Fafanlap Distrik Misol Selatan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Peran pemerintah kabupaten dan distrik tentu menjadi pendukung utama dalam pengembangan kampung berbasis IT.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, dampak pelaksanaan kegiatan, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan ditulis dengan berbentuk paragraf, konstruktif dan jelas.

Di Fafanlap, Raja Ampat, penerapan E-Government memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Desa dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. E-Government mengurangi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Orang-orang di desa mungkin lebih mudah mendapatkan informasi tentang pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, perijinan, dan anggaran. Selain itu, E-Government dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat desa melalui pendampingan dan pelatihan teknologi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan zaman modern.

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya dan sebagai upaya rencana tindak lanjut dari kegiatan ini maka sangat diperlukan kegiatan sejenis dengan melakukan Pemerintah desa perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang memadai dan perangkat keras yang diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan E-Government di Pemerintah Desa di Fafanlap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberi penulis kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Pengabdian Masyarakat. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Masyarakat, dan memenuhi persyaratan untuk jabatan fungsional dosen dan proses sertifikasi dosen. Pemerintah Desa Fafanlap melaksanakan Pengabdian Masyarakat. Penulis sangat menyadari bahwa laporan pengabdian masyarakat ini tidak akan lengkap tanpa partisipasi dan peran nyata dari semua pihak. Untuk itu, penulis hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rustamadji, M.Si. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) yang sudah memberikan dukungan moral dan dukungan kebijakan.
2. Hendra Sudirman, S.P., M.Si. Ketua LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) yang sudah memfasilitasi sangat baik dalam program Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I., Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) yang sudah bersinergi dengan baik dalam program Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tim Pengabdian dan penyusun laporan pengabdian Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) yang sudah berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Semua pihak yang penulis mungkin tidak bisa sebutkan turut membantu menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Munzir, T. Danuwijaya, A. Tunang, L. Dinar, and P. Kassa, "Edukasi Financial Technology (FINTECH) pada Pelajar di Kota Sorong," *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 28–35,

- 2023, doi: 10.61142/samakta.v1i1.59.
- [2] E. Ridhawati, D. Susianto, B. Buchori, T. Taufik, and M. Mistina, "Pengembangan Media Tata Kelola dan Informasi Potensi Desa Berbasis E-Government pada Desa Tiyuh Karta Sari," *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 29–34, 2022.
- [3] M. Munzir, Y. Andriyan, F. Ramadani, R. Jumiati Syafruddin, E. Fakdawer, and R. Jonmer Tumana, "PELATIHAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS RUMAH IBADAH PADA DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, vol. 7, no. 5, pp. 4712–4719, 2023, doi: 10.31764/jmm.v7i5.17139.
- [4] M. Munzir, "Pelatihan Akuntansi dan Manajemen dalam Rangka Pengelolaan BUMDes di Desa Tanjong, Kabupaten Luwu," *Jurnal ABDIMASA: Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 21–25, 2020.
- [5] Yoga Andriyan, "Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, vol. 3, no. 1, pp. 47–54, 2021.
- [6] H. Sulistiyo, A. Martua, S. Sayuti, M. Mulyana, and I. T. Ginting, "Government Performance Pada Kebijakan Transformasi Digital: Bagaimana Transformation Capability Mempengaruhinya? (Studi Empiris Di Provinsi Maluku Utara)," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, vol. 6, no. 2, pp. 95–113, 2023, doi: 10.33701/jkp.v6i2.3679.
- [7] Y. Andriyan, S. Muhamad, Y. Difinubun, and H. Hidayat, "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual)," *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 2, pp. 17–24, 2022.
- [8] F. Elden Palyama, Y. Andriyan, M. Ery Kusmiadi, and I. Pemerintahan, "EVALUASI PELAYANAN ASN TERHADAP TUGAS POKOK PECAHAWAI DI KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG KOTA SORONG," *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adimistrasi Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 27–35, 2023.
- [9] I. Irham, A. Wijaya Syam, and Y. Andriyan, "Analisis Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Smartfren Telecom Makassar," *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adimistrasi Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 52–63, 2023.
- [10] R. Fitri, A. N. Asyikin, and A. S. B. Nugroho, "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik," *POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 99–105, 2017.
- [11] B. Agus Diana, A. Sunarya, and R. Harta, "Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, pp. 181–194, 2024.
- [12] Y. Andriyan, A. M. Rajab, R. Hidayat, S. Muhamad, and M. Munzir, "Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adimistrasi Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 1–18, 2023.
- [13] S. Sulismadi, W. Wahyudi, and M. Muslimin, "Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing," *Aristo*, vol. 5, no. 2, p. 216, 2017, doi: 10.24269/aristo.v/2.2016.2.
- [14] I. Nuralim and S. Navasari, "Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Kertasaya Kecamatan Panawangan," *Unigal Repository*, pp. 128–136, 2023.
- [15] W. Sulastri, D. Kustiawan, A. A. J. Sinlae, and M. Irfan, "Pengembangan Sistem E-Government Untuk Peningkatan Layanan Publik Pada Tata Kelola Administrasi Desa," *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, vol. 8, no. 6, p. 177, 2021, doi: 10.30865/jurikom.v8i6.3650.
- [16] B. Pujiyono, A. A. A. Ushud, W. Windarto, and A. D. Logiana, "Penerapan E Government Bagi Aparat Desa Wanagiri Menuju Desa Digital," *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 322–334, 2023, doi: 10.30656/ps2pm.v5i2.7455.
- [17] A. Pertiwi, H. Dema, A. Mustanir, and E. Anugrah, "PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, vol. 9, no. 3, pp. 130–139, 2021, doi: 10.55678/prj.v9i3.508.
- [18] Y. Andriyan, A. M. Rajab, and A. C. Pamungkas, "Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong," vol. 1, no. 2, pp. 24–35, 2024, doi: 10.61142/samakta.v1i2.127.

- [19] O. H. Taufiq, D. Yuliani, and D. Hermawandi, "Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 6, no. 1, pp. 145–152, 2019.
- [20] A. R. Randisa and Y. Andriyan, "ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL TWITTER RUANG GURU SEBAGAI ALTERNATIF SARANA PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENGGUNA AKTIF TWITTER RUANG GURU MELALUI #RUANGGURU," *JURNAL ADHIKARI*, vol. 1, no. 4, pp. 162–167, 2022, [Online]. Available: <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>
- [21] N. Nursyamsi, J. Juminah, and R. Hidayat, "Minat dan Kepuasan Mahasiswa Fhisipol Unimuda Sorong Menonton Program Talk Show Mata Najwa di Youtube," *KOMMUNAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2023.
- [22] R. Hidayat, M. Munzir, and Y. Andriyan, "Anlisis pemberitaan Infotainment Dalam Perspektif Jurnalis Tribun Timur," *KOMMUNAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2023.
- [23] S. Na'afi and A. Purwanti, "Operasi Bisnis Transnasional dan Pembangunan Berkelanjutan: Eksplorasi Bibliometrik tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Praktik Etis, dan Dampak Lingkungan," *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, vol. 5, no. 2, pp. 11–24, 2023.
- [24] S. Widyastuti, "SEBUAH SINTESIS PADA LITERATUR: STRATEGI INTERVENSI PEMASARAN HIJAU MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Riset Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 83–94, 2019.
- [25] M. Berliandaldo, A. Chodiq, and D. Fryantoni, "Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong," *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 221–234, 2021.